

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Ambaye, Daniel W., 2015, (*Springer Theses*) *Land Rights and Expropriation in Ethiopia*, Real Estate Planning and Land Law, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm.
- Black, H.C, 1968, *Black's Law Dictionary* edisi keempat, St. Paul Minnessotta, West Publishing Co.
- Cho, Byungkoo, 2017, "Just Compensation in Eminent Domain in Korea: From the Perspective of Fairness", *Eminent Domain: A Comparative Perspective*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Elly, James W, 2008, *The Guardian of Every Other Right: A Constitutional History of Property Rights*, Oxford University.
- Gunanegara, 2016, *Hukum Administrasi Negara, Jual-Beli dan Pembebasan Tanah*, Tatanusa, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta.
- Jung, Kisang, 2017, "Overall Due Process in Taking in Korea", *Eminent Domain: A Comparative Perspective*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Kadir, Muhammad A, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kim, I., Lee, H., dan Somin, I., 2017, "Conclusion", *Eminent Domain: A Comparative Perspective*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Lee, Hojun, 2017, "Public Interest Criteria and Korea's Scrutiny System", *Eminent Domain: A Comparative Perspective*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Mudjiono, 1992, *Hukum Agraria*, Liberty, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Sitorus, O., dan Limbong, D., 2004, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.

Soekanto, S., dan Mamudji, S., 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soesangobeng, H, 2012, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria*, STPN Press, Yogyakarta.

Sumardjono, Maria S. W., 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia Pustaka, Jakarta.

Sumardjono, Maria S. W., 2009, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W., 2015, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia: Dari Keputusan Presiden Sampai Undang-Undang*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Wyman, Katrina M., 2007, *The Measure of Just Compensation*, University of California, Davis.

Artikel dan Jurnal.

FAO, 2008, *Compulsory Acquisition of Land and Compensation*, *FAO Land Tenure Studies 10*, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Roma.

Golay C., dan Cismas I., *Legal Opinion: The Right to Property from Human Rights Perspective*, *Droits et Democratie*.

Jibril, M., Pratama A.M., dan Raidangi, J., *Konsep penggabungan antara NJOP dan nilai pasar dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum*, *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 6, no. 1, Mei 2020.

Sax, J, 1964, *Takings and the Police Power*, *Yale Law Journal*, v.74.

Internet

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>, diakses tanggal 12 Juli 2023.

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/layak>, diakses tanggal 12 Juli 2023

Korea Legislation Research Institute, https://elaw.klri.re.kr/kor_service/lawView.do?hseq=60423&lang=ENG, diakses tanggal 4 Juli 2023.

Muhdany Yusuf Laksono, Begini Cara Pemerintah Tentukan Nilai Ganti Rugi Pengadaan Tanah, www.kompas.com/properti/read/2023/01/07/110000621/begini-cara-pemerintah-tentukan-nilai-ganti-rugi-pengadaan-tanah, diakses tanggal 29 Mei 2023.

Muhdany Yusuf Laksono, www.kompas.com/properti/read/2022/06/07/181150721/soal-pengadaan-dan-pengelolaan-tanah-di-ikn-atr-bpn-berguru-pada-korsel, diakses tanggal 5 Juli 2023.

The National Assembly of The Republic of Korea, *Constitution of The Republic of Korea*, https://korea.assembly.go.kr:447/res/low_01_read.jsp, diakses tanggal 28 Juni 2023.

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak atas Tanah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penilai Publik.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penilai Publik.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penilai Publik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penilai Pertanahan.